**ABSTRAK**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI ASN DILINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. SUMATERA UTARA BERDASARKAN**

**PP NO.53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**OLEH :**

**NURAINI SIREGAR**

**165114015**

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran, dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai pelanggaran yang dilakukan pegawai yang bersangkutan, agar mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Beberapa Pelanggaran disiplin juga terjadi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara. Berkaitan dengan hal tersebut penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara. Rumusan masalah ada 3 (tiga) yaitu pertama bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara, kedua hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Sanksi Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara, ketiga apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh BKD dan Inspektorat dalam penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, dengan spesifikasi penelitian *analisis deskriptif* yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif.

Prosedur penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan dijatuhkannya sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak masuk kerja, penggadaian barang atau inventaris kantor dengan merujuk pada pasal-pasal yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dasar pertimbangan penegakan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin untuk Aparatur Sipil Negaranya. Alasannya yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin berdampak pada bagian lingkungan kerjanya, instansinya dan negaranya. Hambatan yang terjadi adalah masih tingginya toleransi atasan dalam memberikan izin keluar kantor kepada pegawainya, dan rendahnya kesadaran pegawai. Atasan memiliki rasa kasihan atau ewuh-pekewuh terhadap pegawainya yang melanggar apabila ia harus memberikan surat peringatan tertulis akan berdampak pada penurunan gaji. Selain itu untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara dilakukan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi pegawai yang lain.

**Kata Kunci** : Disiplin, Teladan, Aparatur Sipil Negara, Penegakan Hukuman Disiplin,

**ABSTRACT**

**LEGAL STUDY OF THE APPLICATION OF DISCIPLINE SANCTIONS FOR ASNS IN THE ENVIRONMENT OF COPYRIGHT WATER RESOURCES AND PROV. NORTH SUMATERA BASED**

**PP NO. 53 OF 2010 CONCERNING**

**DISCIPLINE CIVIL SERVANTS**

**BY :**

**NURAINI SIREGAR**

**165114015**

Government Regulation Number 53 Year 2010 concerning the discipline of Civil Servants includes obligations, prohibitions, and disciplinary penalties that can be imposed on Civil Servants who have been proven to have committed violations, intended to foster Civil Servants who have committed violations, in the form of mild, moderate, disciplinary penalties, or severe in accordance with the violations committed by the employee concerned, so that they have an attitude of regret and try not to repeat and improve themselves in the future. Some disciplinary violations also occur in the environment of the Office of Water Resources Cipta Karya and Spatial Prov. North Sumatra. In this regard the writing of this law aims to find out how the application of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2010 concerning discipline for State Civil Apparatus in the Office of Water Resources Cipta Karya and Spatial Prov. North Sumatra. The problem formulation is 3 (three), first, how is the application of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 53 of 2010 concerning Discipline for State Civil Apparatus, secondly what obstacles are faced in applying Disciplinary Sanctions for State Civil Apparatus within the Cipta Karya and Tata Water Resources Office Prov. Room North Sumatra, third is whether the efforts made by the BKD and the Inspectorate in the enforcement of discipline for the State Civil Apparatus within the Office of Water Resources Cipta Karya And Spatial Prov. North Sumatra.

Writing this law uses an empirical juridical approach, with descriptive analysis research specifications sourced from literature studies and interviews and then analyzed qualitatively.

Procedure for the enforcement of disciplinary penalties for the State Civil Apparatus within the Office of Water Resources Cipta Karya and Spatial Prov North Sumatra is in accordance with the provisions contained in applicable regulations. This is indicated by the imposition of sanctions for employees who commit disciplinary violations such as absent from work, pawning goods or office inventory by referring to the articles contained in Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants. The basis for consideration of upholding disciplinary sanctions for the State Civil Apparatus is the basis for consideration for officials in charge of imposing disciplinary penalties for the State Civil Apparatus. The reasons that form the basis of the judgment in disciplinary action have an impact on part of his work environment, his institution and his country. Barriers that occur are the high tolerance of superiors in giving out of office permits to their employees, and low employee awareness. Bosses have feelings of pity or whims for their employees who violate if he has to provide a written warning letter will have an impact on salary reduction. In addition to increasing the discipline of the State Civil Apparatus within the Office of Water Resources Cipta Karya and Spatial Prov. North Sumatra carried out the application of sanctions in accordance with the level of error. This is to create a deterrent effect for other employees.

**Keywords** : Discipline, Model, State Civil Apparatus, Enforcement of Disciplinary Punishment